



## Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan UMKM Berbasis Jaminan BPKB Motor: Evaluasi Sistem Verifikasi dan Survei

Farkha Fitriyani<sup>1\*</sup>, Prayitno<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Akuntansi, Politeknik Pancasakti Global Tegal, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [farkhay797@gmail.com](mailto:farkhay797@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study examines the document verification process and field survey implementation in motorcycle BPKB-backed financing for the MSME sector and their impact on non-performing loan (NPL) risk. The research addresses the high risk of problematic financing due to weaknesses in identity validation, collateral survey accuracy, and income verification during the initial screening. A qualitative approach with a case study design was used, including data from 250 debtors and interviews with Credit Marketing Officers (CMOs) and credit analysts. Data analysis involved data reduction, display, and thematic conclusion drawing, supported by descriptive quantitative analysis. The findings show an NPL rate of 28%, with 75% of debtors with identity discrepancies defaulting, 63% of those with insufficient surveys facing delinquency, and 64% of those with unverified income failing to meet obligations. These results highlight the link between administrative verification quality, field survey procedures, and default risk. The study suggests enhancing digital-based identity validation systems, standardizing survey procedures, and improving income verification methods tailored to MSME characteristics as strategic measures to mitigate risk. The findings offer practical insights for financing company management in strengthening internal controls and contribute to the development of credit risk management literature in non-bank MSME financing.*

**Keywords:** *BPKB Financing; Document Verification; Field Survey; MSME; Non-Performing Loans.*

**Abstrak.** Studi ini meneliti proses verifikasi dokumen dan implementasi survei lapangan dalam pembiayaan berbasis BPKB untuk sepeda motor di sektor UMKM dan dampaknya terhadap risiko kredit macet (KPR). Penelitian ini membahas risiko tinggi pembiayaan bermasalah akibat kelemahan dalam validasi identitas, akurasi survei jaminan, dan verifikasi pendapatan selama penyaringan awal. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, termasuk data dari 250 debitur dan wawancara dengan Petugas Pemasaran Kredit (CMO) dan analis kredit. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan tematik, yang didukung oleh analisis kuantitatif deskriptif. Temuan menunjukkan tingkat KPR sebesar 28%, dengan 75% debitur dengan ketidaksesuaian identitas mengalami gagal bayar, 63% dari mereka yang memiliki survei tidak memadai menghadapi keterlambatan pembayaran, dan 64% dari mereka yang pendapatannya tidak terverifikasi gagal memenuhi kewajiban. Hasil ini menyoroti hubungan antara kualitas verifikasi administratif, prosedur survei lapangan, dan risiko gagal bayar. Studi ini menyarankan peningkatan sistem validasi identitas berbasis digital, standarisasi prosedur survei, dan perbaikan metode verifikasi pendapatan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko. Temuan ini menawarkan wawasan praktis bagi manajemen perusahaan pembiayaan dalam memperkuat pengendalian internal dan berkontribusi pada pengembangan literatur manajemen risiko kredit dalam pembiayaan UMKM non-bank.

**Kata Kunci:** Kredit Macet; Pembiayaan BPKB; Survei Lapangan; UMKM; Verifikasi Dokumen.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun demikian, akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM, terutama dalam memperoleh modal kerja yang cepat dan fleksibel. Lembaga pembiayaan non-bank hadir sebagai alternatif solusi melalui skema kredit dengan jaminan aset bergerak seperti

BPKB kendaraan bermotor. Skema ini dinilai lebih praktis dibandingkan kredit perbankan konvensional yang cenderung memiliki persyaratan administratif lebih kompleks.

Dalam praktiknya, pembiayaan dengan jaminan BPKB motor berkembang pesat karena proses pencairannya relatif cepat dan persyaratannya lebih sederhana. Debitur umumnya hanya diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta slip gaji atau bukti usaha. Meskipun terlihat administratif, dokumen-dokumen tersebut memiliki fungsi krusial dalam menilai kelayakan kredit dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Secara teoritis, proses analisis kredit bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Teori manajemen risiko kredit menjelaskan bahwa kegagalan dalam proses verifikasi awal dapat meningkatkan probabilitas terjadinya kredit bermasalah (*credit default*) (Chairani Lubis & Nawawi, 2025; Putra Setiawan & Nur Salim, 2025; Windy et al., 2025). Oleh karena itu, validasi identitas, survei jaminan, serta verifikasi kemampuan membayar merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembiayaan.

Risiko kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan lembaga pembiayaan. Tingginya rasio NPL dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas perusahaan. Menurut konsep *asymmetric information*, ketidakseimbangan informasi antara kreditur dan debitur dapat menimbulkan moral *hazard* dan *adverse selection* (Nelly & Siregar, 2022; Nuryanti, 2025; Zulianto & Lestari, 2022). Dalam konteks pembiayaan BPKB, informasi yang tidak diverifikasi secara mendalam berpotensi meningkatkan risiko tersebut.

Validasi identitas melalui KTP dan KK menjadi tahap awal dalam proses analisis kredit untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data pribadi debitur. Verifikasi identitas merupakan proses sistematis dalam mengecek keakuratan, keaslian, dan konsistensi informasi individu yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan. Proses ini tidak hanya mencakup pencocokan data administratif seperti nama, alamat, dan status keluarga, tetapi juga melibatkan konfirmasi legalitas dokumen serta kesesuaian antara identitas debitur dan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian alamat, status keluarga, atau identitas penjamin dapat memengaruhi akurasi analisis risiko karena berpotensi menunjukkan adanya informasi yang tidak transparan atau bahkan manipulatif. Identitas yang tidak diverifikasi secara menyeluruh dapat membuka peluang terjadinya fraud, seperti penggunaan identitas pihak lain atau pemalsuan data, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, sistem verifikasi administrasi memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan (*trust*) serta meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan kredit.

Selain verifikasi identitas, survei lapangan terhadap objek jaminan dan kondisi usaha debitur juga menjadi faktor kunci dalam proses penilaian risiko. Survei dilakukan untuk memastikan keberadaan fisik kendaraan sebagai jaminan serta menilai secara langsung aktivitas usaha yang dijalankan oleh debitur. Dalam perspektif risk assessment, observasi langsung mampu mengurangi ketidakpastian informasi yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui dokumen administratif (Sucianty & Manda, 2022). Melalui survei lapangan, analisis kredit dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kapasitas usaha, stabilitas pendapatan, serta karakter debitur dalam lingkungan sosialnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi kelemahan apabila survei dilakukan secara tidak mendalam, terburu-buru, atau hanya bersifat formalitas administratif, sehingga informasi yang diperoleh menjadi kurang akurat dan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit.

Verifikasi pendapatan atau slip gaji juga memiliki implikasi signifikan terhadap kemampuan bayar debitur dalam proses analisis kredit. Verifikasi pendapatan merupakan proses sistematis untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keberlanjutan sumber penghasilan debitur sebagai dasar penilaian kapasitas pembayaran (*capacity*). Proses ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen formal seperti slip gaji atau laporan usaha, tetapi juga melibatkan konfirmasi langsung terhadap aktivitas ekonomi debitur, seperti arus kas, volume transaksi, dan stabilitas pendapatan. Dalam konteks pembiayaan UMKM, pelaku usaha sering kali tidak memiliki laporan keuangan yang terstandarisasi, sehingga penilaian kemampuan bayar lebih bergantung pada observasi lapangan, wawancara, serta validasi informal terhadap aktivitas usaha. Kondisi ini meningkatkan ketergantungan pada kejujuran informasi yang disampaikan debitur. Ketidakesesuaian antara pendapatan riil dan dokumen yang diajukan dapat menyebabkan overestimasi kemampuan bayar, yang pada akhirnya meningkatkan risiko default. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakakuratan informasi pendapatan berkorelasi positif dengan peningkatan kredit bermasalah (Makuradde et al., 2025; Ndruru et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan mekanisme verifikasi pendapatan, baik melalui *cross-check* sederhana maupun pendekatan berbasis observasi, menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM.

Dalam praktik lembaga pembiayaan, Credit Marketing Officer (CMO) berperan penting dalam proses survei dan pengumpulan data. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga analitis dalam menilai karakter debitur. Teori 5C of Credit (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) menekankan bahwa karakter dan kapasitas merupakan unsur dominan dalam menentukan kelayakan kredit (Maatuil et al., 2025; Putra Setiawan & Nur Salim, 2025;

Windy et al., 2025; Zulianto & Lestari, 2022). Jika proses survei tidak dilakukan secara komprehensif, maka prinsip 5C tidak dapat diterapkan secara optimal.

Fenomena kemacetan pembayaran pada pembiayaan BPKB motor sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi debitur, tetapi juga oleh kualitas analisis awal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelemahan dalam proses verifikasi administrasi dan survei lapangan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko gagal bayar. Hal ini menandakan adanya kemungkinan celah dalam sistem pengendalian internal perusahaan pembiayaan.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti faktor makroekonomi dan kondisi keuangan debitur sebagai determinan kredit macet. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis proses verifikasi dokumen dan akurasi survei lapangan dalam pembiayaan berbasis jaminan BPKB motor masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks pembiayaan sektor UMKM.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam proses verifikasi dokumen, mekanisme survei lapangan, serta praktik analisis kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika internal, kendala operasional, dan potensi risiko yang tidak selalu terlihat dalam data kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses verifikasi identitas, akurasi survei jaminan, serta validasi pendapatan dalam pembiayaan jaminan BPKB motor sektor UMKM, serta implikasinya terhadap risiko kredit macet. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan pembiayaan serta kontribusi akademik dalam pengembangan literatur manajemen risiko kredit pada sektor pembiayaan non-bank.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Keterbatasan agunan tetap, minimnya laporan keuangan yang terstandarisasi, serta keterbatasan literasi keuangan menjadi hambatan dalam memperoleh kredit perbankan (Lewaru et al., 2023; Oktaviani et al., 2023; Riandi, 2023; Sejati & Hadratullah, 2024). Dalam kondisi tersebut, lembaga pembiayaan non-bank hadir sebagai alternatif penyedia modal kerja yang lebih fleksibel dan cepat.

Pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor menjadi salah satu produk unggulan perusahaan pembiayaan karena prosedurnya relatif sederhana dan proses pencairannya lebih cepat dibandingkan kredit bank konvensional. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM tetap menggunakan kendaraan untuk operasional usaha meskipun BPKB dijadikan jaminan. Model pembiayaan berbasis aset bergerak ini termasuk dalam kategori *asset-based lending* yang berfokus pada nilai jaminan sebagai mitigasi risiko (Khoiriyah & Mashudi, 2024; Masyhudi & Setiawan, 2023; Nuryanti, 2025; Rosyida, 2022).

Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga membawa konsekuensi risiko yang lebih tinggi apabila tidak diimbangi dengan proses analisis kredit yang ketat. Berbeda dengan perbankan yang memiliki sistem credit scoring terintegrasi, lembaga pembiayaan non-bank sering kali lebih mengandalkan analisis lapangan oleh petugas survei. Oleh karena itu, kualitas proses verifikasi administrasi dan survei lapangan menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam teori manajemen risiko, risiko kredit menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola oleh lembaga keuangan (Amini et al., 2024; Fahri Tobing et al., n.d.; Khasanah & N., 2023). Indikator umum yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit adalah Non-Performing Loan (NPL), yaitu rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan.

Menurut Sucianty dan Manda (2022) masalah kredit macet sering kali dipicu oleh *asymmetric information* antara kreditur dan debitur. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan *adverse selection* (pemilihan debitur berisiko tinggi) dan *moral hazard* (perilaku tidak bertanggung jawab setelah kredit diberikan). Dalam konteks pembiayaan BPKB motor, risiko ini dapat muncul apabila proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh atau survei lapangan hanya bersifat formalitas.

Selain itu, teori pengendalian internal menyatakan bahwa lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan analisis kredit (Chairani Lubis & Nawawi, 2025; Putri et al., 2023; Sa'adah et al., 2024). Oleh karena itu, prosedur analisis kredit yang sistematis dan terdokumentasi menjadi elemen penting dalam mengurangi potensi kerugian akibat kredit macet. Proses ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga observasi langsung terhadap kondisi usaha dan karakter debitur.

Prinsip 5C of Credit merupakan pendekatan klasik yang digunakan dalam menilai kelayakan kredit, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* (Asyiqukaf, 2023; Khoiriyah & Mashudi, 2024; Rohmawati & Dahruji, 2024; Sofyana et al., 2024; Wafi &

Muhammad, 2023) Prinsip ini menekankan bahwa analisis kredit tidak hanya berfokus pada jaminan, tetapi juga pada karakter dan kemampuan bayar debitur. Dalam pembiayaan UMKM dengan jaminan BPKB motor, kelima unsur tersebut tetap relevan untuk diterapkan.

*Character* berkaitan dengan integritas dan rekam jejak debitur dalam memenuhi kewajiban finansial. *Capacity* mengacu pada kemampuan menghasilkan arus kas untuk membayar cicilan. *Capital* mencerminkan kekuatan modal usaha, sedangkan *Collateral* menjadi jaminan apabila terjadi gagal bayar. *Condition* berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sektor usaha yang memengaruhi kelangsungan bisnis debitur.

Dalam praktiknya, validasi KTP dan KK berperan dalam menilai unsur *character*, sementara verifikasi slip gaji atau pendapatan usaha berkaitan dengan *capacity*. Survei fisik kendaraan dan kondisi usaha menjadi bagian dari *collateral* dan *condition* assessment. Apabila salah satu unsur 5C tidak dianalisis secara mendalam, maka keputusan kredit berpotensi menjadi tidak akurat dan meningkatkan risiko *default*.

Verifikasi dokumen merupakan langkah awal dalam memastikan keabsahan identitas dan kelengkapan administratif debitur. Proses ini meliputi pengecekan kesesuaian data KTP, KK, STNK, dan BPKB, serta validasi slip gaji atau bukti pendapatan. Dalam perspektif pengendalian internal, verifikasi dokumen berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap fraud dan manipulasi data (Nyimbili & Nyimbili, 2024; Tussa'adah, 2024; ZUNIGA, 2021).

Survei lapangan memiliki fungsi yang lebih komprehensif karena memungkinkan petugas untuk mengamati langsung kondisi usaha dan objek jaminan. Observasi langsung dapat mengurangi ketidakpastian informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dari dokumen administratif (Khoiriyah & Mashudi, 2024; Sucianty & Manda, 2022). Namun demikian, efektivitas survei sangat bergantung pada kompetensi dan integritas petugas lapangan, seperti Credit Marketing Officer (CMO).

Apabila survei dilakukan secara tidak detail atau tanpa cross-check data, maka potensi kesalahan analisis kredit akan meningkat. Dalam konteks pengendalian internal, hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada aktivitas kontrol dan monitoring. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan petugas, serta sistem evaluasi berkala guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada proses verifikasi dokumen dan pelaksanaan survei lapangan dalam pembiayaan jaminan BPKB motor di Perusahaan NSCFINANCE. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme screening awal debitur serta praktik manajemen risiko kredit yang diterapkan perusahaan. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi riil operasional perusahaan, khususnya pada segmen pembiayaan UMKM (Sugiyono, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Creswell, 1998). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Credit Marketing Officer (CMO), analis kredit, serta pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan di NSCFINANCE. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan berupa laporan pembiayaan, data kolektibilitas, serta arsip administratif terhadap 250 debitur pembiayaan BPKB motor pada periode penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses analisis dan persetujuan kredit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terbatas terhadap proses kerja, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Wawancara difokuskan pada prosedur validasi identitas, mekanisme survei lapangan, metode verifikasi pendapatan debitur, serta evaluasi risiko kredit macet. Dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat Non-Performing Loan (NPL), pola ketidaksesuaian data, dan hubungan antara kualitas verifikasi dengan terjadinya gagal bayar.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Untuk memperkuat temuan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif kuantitatif sederhana guna menghitung persentase debitur bermasalah berdasarkan variabel ketidaksesuaian identitas, kualitas survei, dan validasi pendapatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kualitas proses verifikasi di NSCFINANCE dengan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis 250 debitur pembiayaan jaminan BPKB motor pada sektor UMKM. Dari total tersebut, 180 debitur (72%) tergolong lancar, sedangkan 70 debitur (28%) mengalami kredit macet. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 28% ini menunjukkan

risiko pembiayaan yang relatif tinggi dan memerlukan evaluasi mendalam terhadap proses analisis kredit. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kemacetan berkorelasi dengan kelemahan pada tahap verifikasi awal, khususnya validasi identitas, akurasi survei lapangan, dan verifikasi pendapatan.

Dari aspek validasi identitas, sebanyak 210 debitur (84%) memiliki dokumen KTP dan KK yang dinyatakan valid dan sesuai, sementara 40 debitur (16%) ditemukan memiliki ketidaksesuaian administratif, seperti perbedaan alamat domisili, status keluarga yang tidak diperbarui, atau indikasi penggunaan identitas penjamin yang tidak diverifikasi secara langsung. Dari 40 debitur dengan validasi bermasalah tersebut, 30 debitur (75%) mengalami kemacetan pembayaran. Sebaliknya, dari 210 debitur dengan identitas valid, hanya 40 debitur (19%) yang mengalami macet. Temuan ini menunjukkan perbedaan risiko yang signifikan antara kelompok dengan validasi identitas kuat dan lemah.

Pada aspek survei lapangan, tercatat 195 debitur (78%) disurvei secara detail, mencakup dokumentasi foto kendaraan, pengecekan nomor rangka dan mesin, observasi lokasi usaha, serta wawancara lingkungan sekitar. Sementara itu, 55 debitur (22%) hanya menjalani survei administratif terbatas. Dari kelompok survei terbatas tersebut, 35 debitur (63%) mengalami kemacetan pembayaran. Sebaliknya, pada kelompok survei detail, tingkat kemacetan hanya 35 dari 195 debitur (18%). Data ini menunjukkan bahwa kualitas survei lapangan memiliki hubungan kuat dengan risiko kredit macet.

Verifikasi pendapatan menunjukkan pola yang serupa. Sebanyak 200 debitur (80%) dinyatakan memiliki bukti pendapatan tervalidasi melalui konfirmasi usaha atau pengecekan transaksi sederhana, sedangkan 50 debitur (20%) memiliki dokumen pendapatan yang tidak diverifikasi secara mendalam. Dari 50 debitur tersebut, 32 debitur (64%) mengalami kredit macet. Sementara itu, pada kelompok dengan pendapatan tervalidasi, tingkat kemacetan hanya 38 dari 200 debitur (19%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa validitas informasi pendapatan berkontribusi signifikan terhadap kualitas pembiayaan.

Hasil wawancara dengan analis kredit dan Credit Marketing Officer (CMO) mengungkapkan bahwa tekanan target pencairan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketelitian proses verifikasi. Dalam beberapa kasus, survei dilakukan dalam waktu singkat tanpa analisis mendalam terhadap kapasitas usaha debitur. Selain itu, validasi slip gaji atau pendapatan usaha sering kali hanya berdasarkan pernyataan lisan tanpa bukti transaksi yang memadai, khususnya pada pelaku UMKM yang tidak memiliki pembukuan formal.

Analisis tematik menunjukkan bahwa kelemahan dalam satu aspek verifikasi sering kali diikuti kelemahan pada aspek lainnya. Dari 70 debitur yang macet, sebanyak 52 debitur (74%)

memiliki minimal dua kelemahan sekaligus dalam proses verifikasi, baik pada identitas, survei, maupun pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya pola kumulatif risiko, di mana kelemahan sistematis dalam proses screening meningkatkan probabilitas terjadinya kredit bermasalah.

Temuan penelitian menegaskan bahwa kualitas proses verifikasi administrasi dan survei lapangan memiliki hubungan erat dengan tingkat kredit macet. Tingkat NPL sebesar 28% dalam sampel ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi eksternal, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas proses analisis kredit internal. Dengan demikian, penguatan sistem verifikasi dan pengendalian internal menjadi faktor krusial dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM.

### **Validasi Identitas dan Reduksi Asimetri Informasi**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 75% debitur dengan identitas bermasalah mengalami kredit macet. Angka ini mengindikasikan bahwa validasi identitas bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen utama dalam proses screening risiko. Dalam teori asimetri informasi, ketidakseimbangan informasi antara kreditur dan debitur dapat menyebabkan adverse selection (Nurhaliza et al., 2023; Zayrin et al., 2025). Identitas yang tidak diverifikasi secara komprehensif membuka ruang bagi debitur berisiko tinggi untuk lolos seleksi awal.

Validasi KTP dan KK berkaitan erat dengan aspek *Character* dalam prinsip 5C (Amini et al., 2024; Putri et al., 2023). Karakter mencerminkan integritas dan komitmen debitur terhadap kewajiban finansialnya. Ketidaksesuaian alamat atau data keluarga dapat menjadi indikator lemahnya transparansi, yang dalam jangka panjang meningkatkan risiko moral hazard.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Chairani Lubis & Nawawi, 2025; Maatuil et al., 2025) menekankan bahwa proses *due diligence* pada tahap awal kredit sangat menentukan kualitas portofolio pembiayaan. Jika tahap identifikasi dasar saja tidak dilakukan secara ketat, maka seluruh proses analisis berikutnya berpotensi bias. Oleh karena itu, verifikasi berbasis digital dan integrasi dengan sistem kependudukan nasional dapat menjadi solusi strategis.

Selain itu, validasi identitas juga berfungsi sebagai alat mitigasi fraud. Praktik penggunaan identitas pihak lain atau penjamin fiktif dapat diminimalkan melalui konfirmasi langsung dan dokumentasi biometrik. Hal ini memperkuat pengendalian internal perusahaan pembiayaan.

Dengan demikian, validasi identitas bukan hanya aspek legalitas, tetapi juga bagian integral dari manajemen risiko kredit. Penguatan pada tahap ini dapat menurunkan probabilitas adverse selection secara signifikan.

### **Akurasi Survei Lapangan sebagai Instrumen Evaluasi Kapasitas**

Data menunjukkan bahwa debitur yang tidak disurvei secara detail memiliki tingkat kemacetan 63%, jauh lebih tinggi dibandingkan 18% pada kelompok survei detail. Temuan ini menegaskan pentingnya observasi lapangan dalam menilai kapasitas usaha debitur. Dalam konteks risk assessment, survei langsung mampu mengurangi ketidakpastian informasi (Fahri Tobing et al., n.d.; Maatuil et al., 2025).

Prinsip *Capacity* dalam 5C menekankan kemampuan riil debitur untuk membayar kewajiban. Survei lapangan memungkinkan analisis melihat arus aktivitas usaha, volume pelanggan, dan stabilitas operasional. Tanpa observasi tersebut, estimasi kemampuan bayar hanya berbasis asumsi.

Tekanan target pencairan sering kali menjadi faktor yang menurunkan kualitas survei. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan proses tanpa verifikasi memadai justru meningkatkan risiko kerugian jangka panjang. Dalam perspektif manajemen risiko, biaya pengendalian yang lebih tinggi pada tahap awal lebih efisien dibandingkan biaya penagihan dan penyitaan di tahap akhir.

Survei lapangan juga berfungsi sebagai alat monitoring sosial. Wawancara dengan lingkungan sekitar dapat memberikan gambaran karakter dan reputasi debitur. Informasi informal ini sering kali tidak tercantum dalam dokumen administratif.

Dengan demikian, kualitas survei lapangan merupakan determinan dominan dalam meminimalkan risiko kredit macet. Standarisasi prosedur survei dan evaluasi kinerja CMO menjadi kebutuhan strategis perusahaan pembiayaan.

### **Verifikasi Pendapatan dan Tantangan UMKM Informal**

Sebanyak 64% debitur dengan pendapatan tidak tervalidasi mengalami kemacetan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pendapatan merupakan variabel krusial dalam analisis kredit. (Oktaviani et al., 2023; Sucianty & Manda, 2022) menyatakan bahwa ketidakakuratan informasi keuangan debitur berkorelasi dengan peningkatan probabilitas default.

Pada sektor UMKM, tantangan utama adalah tidak tersedianya laporan keuangan formal. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu mengembangkan metode alternatif seperti estimasi arus kas berbasis observasi lapangan. Pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi penilaian *Capacity*.

Dalam teori moral hazard, debitur yang mengetahui bahwa informasinya tidak diverifikasi cenderung memiliki insentif untuk melebihi kemampuan bayar. Oleh karena itu, mekanisme cross-check sederhana seperti bukti transaksi atau konfirmasi pelanggan menjadi penting.

Validasi pendapatan juga berhubungan dengan stabilitas usaha. Usaha dengan arus kas fluktuatif memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan usaha dengan pendapatan stabil. Survei lapangan yang terintegrasi dengan verifikasi pendapatan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi usaha. Dengan demikian, penguatan sistem verifikasi pendapatan menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko pembiayaan UMKM.

### **Implikasi Manajerial dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal**

Tingkat NPL sebesar 28% menunjukkan perlunya evaluasi sistem pengendalian internal. *COSO framework* menekankan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pemantauan berkelanjutan. Dalam konteks ini, verifikasi dokumen dan survei lapangan merupakan bagian dari aktivitas pengendalian.

Temuan bahwa 74% debitur macet memiliki lebih dari satu kelemahan verifikasi menunjukkan adanya risiko sistemik. Artinya, bukan hanya faktor individu debitur yang bermasalah, tetapi juga proses internal yang belum optimal. Perusahaan pembiayaan perlu menerapkan audit internal berkala terhadap proses survei dan validasi dokumen. Evaluasi berbasis data dapat membantu mengidentifikasi pola risiko lebih dini.

Selain itu, pelatihan CMO dalam analisis risiko kualitatif dapat meningkatkan kualitas keputusan kredit. Kompetensi analis menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Integrasi antara validasi identitas, survei detail, dan verifikasi pendapatan dalam satu sistem penilaian risiko terpadu merupakan langkah strategis untuk menekan kredit macet serta mendukung keberlanjutan pembiayaan UMKM.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi dokumen dan pelaksanaan survei lapangan dalam pembiayaan jaminan BPKB motor sektor UMKM serta implikasinya terhadap risiko kredit macet. Berdasarkan analisis terhadap 250 debitur, ditemukan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) mencapai 28%, yang menunjukkan adanya risiko pembiayaan yang cukup signifikan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kelemahan dalam proses screening awal memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya probabilitas gagal bayar.

Dari aspek validasi identitas, sebanyak 75% debitur dengan dokumen KTP dan KK yang tidak sesuai mengalami kredit macet. Temuan ini menunjukkan bahwa validasi identitas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam mengurangi risiko *adverse selection*. Ketidaksesuaian data kependudukan berpotensi menjadi indikator lemahnya integritas atau transparansi debitur.

Pada aspek survei lapangan, penelitian ini menemukan bahwa 63% debitur yang tidak disurvei secara detail mengalami kemacetan, dibandingkan hanya 18% pada kelompok yang disurvei secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas observasi lapangan berperan dominan dalam menilai kapasitas usaha dan karakter debitur. Survei yang bersifat administratif tanpa analisis mendalam meningkatkan risiko kesalahan penilaian kredit.

Verifikasi pendapatan juga terbukti menjadi faktor krusial. Sebanyak 64% debitur dengan pendapatan yang tidak tervalidasi mengalami kredit macet. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa ketidakakuratan informasi keuangan dalam sektor UMKM meningkatkan risiko moral hazard. Dengan demikian, integrasi antara validasi identitas, survei detail, dan verifikasi pendapatan menjadi fondasi penting dalam sistem manajemen risiko pembiayaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko kredit macet dalam pembiayaan jaminan BPKB motor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi debitur, tetapi juga oleh kualitas pengendalian internal perusahaan pembiayaan. Penguatan prosedur verifikasi dan evaluasi kinerja petugas lapangan menjadi kunci dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah serta mendukung keberlanjutan pembiayaan UMKM.

## DAFTAR REFERENSI

- Amini, I., Rusyadi, M., Permana, Y. A., Prenduan, U. A., & Majalengka, U. (2024). Pemberian produk pembiayaan di bank syariah indonesia (bsi) kc cimahi berbasis prinsip 5c. *Aru Journal*, 4(1), 91-108. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol5iss2pp91-100>
- Asyiqulkaf, M. (2023). Implementasi penilaian prinsip 5c dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di bmt mubarakah undaan kudas.
- Chairani Lubis, M., & Nawawi, Z. M. (2025). Mitigasi risiko pembiayaan kur syariah untuk umkm: Studi kasus di bsi kc medan ahmad yani. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 9(2), 537. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31795>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Sage Publications.
- Fahri Tobing, I., Suhaimi, M., Nawawi, Z. M., & Ekonomi Bisnis Islam, F. (n.d.). Manajemen risiko pada pembiayaan usaha kecil dan mikro (Vol. 07, Issue 01).
- Khasanah, M. M., & N. (2023). Pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada pt bank muamalat indonesia kcu medan baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Khoiriyah, Z., & Mashudi. (2024). Analisis peran account officer (ao) dalam manajemen pembiayaan murabahah pada bprs lantabur tebuireng cabang lamongan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).19059](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).19059)
- Lewaru, T. S., Lambyombar, Y., & Uniberua, S. H. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan umkm: Studi pada kabupaten kepulauan aru. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 13-18. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i2.282>
- Maatuil, R. A., Johanis, T., Makinggung, K., Manoppo, P., Program, S., Manajemen, F., Ilmu, P., Teknologi, D., Keguruan, T., Manado, K., & Manado, I. (2025). Penerapan model analisis risiko kredit dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada umkm. <https://doi.org/10.63822/sr4jvg05>
- Makuradde, A. S., Ardasanti, A., Sudirman, & Rais, M. (2025). Analisis efektivitas program kur terhadap pertumbuhan umkm kuliner dan kesejahteraan keluarga di kota makassar. *YUME: Journal of Management*, 8(1).
- Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2023). Analisis mitigasi risiko pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal Sharia Economics (JSE)*. <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.589>
- Ndruru, E., Hulu, P. F., Kakisina, S. M., & Harefa, I. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan pada pelaku umkm di kecamatan gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1460-1473. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4790>
- Nelly, R., & Siregar, S. (2022). Reslaj: Religion education social laa roiba journal analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur reslaj: Religion education social laa roiba journal. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918-930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Nurhaliza, Astuti, & Zulfah. (2023). Validitas instrumen penelitian: Pengaruh metode scaffolding terhadap kemampuan computational thinking peserta didik kelas viii di smp negeri 1 bangkinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 25-28. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.77>
- Nuryanti, E. (2025). Analisis manajemen risiko pada umkm konveksi di rancaekek, kabupaten bandung. *Pengelolaan: Jurnal Manajemen Risiko UMKM*, 2(1), 1654-1667. <https://doi.org/10.62710/3bgkez50>
- Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of purposive sampling techniques with their examples and application in qualitative research studies. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 5(1), 90-99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>
- Oktaviani, M., Oktaria, M., Alexandro, R., Eriawaty, E., & Rahman, R. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif generasi z pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2), 136-145. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.68587>
- Putra Setiawan, M., & Nur Salim, M. (2025). Analisis penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan modal usaha untuk mencegah risiko kredit macet di bmt mubarakah undaan kudas. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11).
- Putri, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis penerapan prinsip 5c pada penyaluran pembiayaan murabahah dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet.

*Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 198-213.  
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.447>

- Riandi. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, sosialisasi sak, dan tingkat pendidikan terhadap pelaporan keuangan umkm berdasarkan sak emkm (studi kasus pada online shop shopee di kota tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Rohmawati, N. K., & Dahruji, D. (2024). Mitigasi risiko non performing financing produk perbankan dengan prinsip 5C. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 442. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5955>
- Rosyida, Y. D. (2022). Implementasi prinsip 5c 7p pada pembiayaan refinancing beragun porsi haji di bank panin dubai syariah kota malang (pp. 165-177).
- Sa'adah, M. A., Ita, & Fitriah, L. (2024). Validitas instrumen penilaian karakter wasaka, angket kecerdasan adversitas dan prokrastinasi akademik mahasiswa. *IDEA: Jurnal Psikologi*, 8(1), 9-16.
- Sejati, A., & Hadratullah. (2024). Analisis penerapan prinsip 5C+1S dalam meminimalisir resiko pembiayaan murabahah modal kerja pada bank syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 34-47. <https://doi.org/10.37216/albirru.v3i1.1621>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis prinsip 5C terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2). <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Sucianty, F. I., & Manda, G. S. (2022). Analisis manajemen risiko kredit usaha (kur) untuk meminimalkan kredit bermasalah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 18-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460372>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui UMKM. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58-63. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v2i2.669>
- Wafi, S., & Muhammad, H. (2023). Risk management of Islamic microfinance institutions: Unique practices at crucial risks. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 5(3), 42-50. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>
- Windy, K., Laksmi, A., & Muttaqin, Z. (2025). Penerapan manajemen risiko penjaminan kredit usaha rakyat (kur) dengan metode four eyes principles. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan ...*, 16(2), 1260-1272. <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.728>
- Zayrin, A. A., Nupus, H., Maizia, K. K., Marsela, S., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Analisis instrumen penelitian pendidikan (uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian). *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 780-789. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1070>
- Zulianto, A., & Lestari, N. D. (2022). Penerapan manajemen risiko kredit dan likuiditas dalam memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada anggota (studi pada BMT Nashrul Umam Balen). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 22-37. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i1.189>
- Zuniga, G. (2021). Hubungan tingkat kinerja baitul maal wat tamwil (BMT) dengan tingkat keberdayaan anggota (kasus BMT Insan Mulia Kota Palembang) GEMELA ZUNIGA.